



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS SOSIAL

LAPORAN KINERJA
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025 ini disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan capaian kinerja maupun kegagalan Dinas Sosial dalam upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026. Capaian kinerja sasaran, program maupun kegiatan yang telah ditetapkan untuk dicapai Tahun 2025 beserta realisasinya, kemudian dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban secara periodik.

Akhirnya, kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyusunan LKj ini, untuk itu saran dan kritik untuk penyempurnaannya sangat diharapkan.

Kepada para pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang terlibat dalam penyusunan LKj Tahun 2025 ini kami ucapkan terimakasih.

Ranai, 19 Januari 2026
Kepala Dinas

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban bagi setiap Instansi Pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang diembannya secara terukur baik keberhasilan dan ataupun kegagalan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam mendukung Visi dan Misi Bupati. Dinas Sosial Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Kemudian diubah kembali sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16) yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

Dinas Sosial mempunyai tanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi di bidang sosial berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan kebijakan daerah di bidang sosial dengan mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati untuk melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang sosial sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan tugasnya berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut.

Pada Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Natuna menetapkan 1 (satu) tujuan yang dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai melalui 6 (enam) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan untuk menghasilkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Capaian Kinerja Dinas Sosial di tahun 2025 dengan skala penilaian sangat memuaskan sesuai dengan penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial dengan Bupati Natuna, adapun Perjanjian Kinerja tersebut berisikan 1 (satu) Sasaran Kinerja dan 1 (satu)

Indikator Kinerja dengan Sasaran Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Indikator Sasaran Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan capaian kinerja sebesar **71,66%**.

Progam dan Kegiatan strategis tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, masalah dan tantangan yang masih akan dihadapi pada pelaksanaan tahun berikutnya, yang mengarah pada rencana aksi bagi pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dibidang Sosial.

Berdasarkan pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Natuna didanai dengan anggaran APBD Kabupaten Natuna dengan klasifikasi pendanaan sebesar Rp. Rp. 8.096.797.000,- (Delapan Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), setelah mengalami perubahan anggaran maka pada APBDP Dinas Sosial Kabupaten Natuna menjadi **Rp. 6.316.054.010,-** (Enam Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Puluh Empat Ribu Sepuluh Rupiah), karena telah terjadi Defisit Anggaran untuk Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebesar **Rp. 1.780.742.990,-** (*Satu Milyar TujuhRatus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

Secara umum Akuntabilitas Keuangan Dinas Sosial menunjukkan nilai yang memuaskan, dari Total Belanja Pegawai Rp. 3.121.195.564,- terealisasi sebesar Rp. 2.992.340.680,- (95,87%). Untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.338.858.446,- terealisasi sebesar Rp. 929.423.770,- (69,42%), untuk Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 1.819.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.359.240.000,- (74,70%), sedangkan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 36.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.987.000,- (35,58%).

Total anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025 sebesar Rp. 2.701.957.586,- (42,78%), sementara anggaran non IKU sebesar Rp. 3.614.096.424,- (57,22%) merupakan belanja yang tidak secara langsung mendukung pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial seperti belanja untuk kebutuhan rutinitas kantor.

Dengan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar Rp. 2.701.957.586,- terealisasi sebesar

Rp. 1.917.499.914,- atau (70,97%) dengan realisasi akuntabilitas kinerja sebesar **71,66%** diharapkan Dinas Sosial mampu mencapai target RPJMD tahun 2025-2029 dan mampu melaksanakan anggaran dengan cukup efektif dan efisien.

Efisiensi anggaran Dinas Sosial tahun 2024 sebesar Rp. 2.701.957.586,- atau (42,78%) ini diperoleh dari perbandingan antara anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan total belanja inefisiensi anggaran Dinas Sosial sebesar Rp. 3.614.096.424,- atau (57,22%).

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sitematika Penulisan.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis.....	8
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	14
2.3 Program Kerja dan Kegiatan.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	25
3.2 Analisis Kinerja.....	26
3.3 Realisasi Anggaran.....	52
BAB IV PENUTUP	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel. II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Dengan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.....	9
Tabel. II.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Sasaran RPJMD Kabupaten Natuna dengan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna 2025-2029.....	10
Tabel. II.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.....	11
Tabel. II.4 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.....	13
Tabel. II.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Tahun 2025.....	14
Tabel. II.6 Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Tahun 2025.....	15
Tabel. II.7 Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025.....	15
Tabel. II.8 ... Program dan Kegiatan Non Indikator Kinerja Utama (Non IKU) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025.....	18
Tabel. II.9 Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025.....	20
Tabel. II.10 Anggaran Program/Kegiatan Non Indikator Kinerja Utama (Non IKU) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025.....	21
Tabel. III.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	26
Tabel. III.2 Capaian Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	28
Tabel. III.3 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Tertangani Melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2025.....	30
Tabel. III.4 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Tertangani Melalui Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2025.....	30
Tabel. III.5 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Tertangani Melalui Program Penanganan Bencana Tahun 2025.....	31
Tabel. III.6 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025.....	32
Tabel. III.7 Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2025.....	33

Tabel. III.8	Jumlah Lansia Tahun 2025.....	34
Tabel. III.9	Jumlah Fakir Miskin Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kabupaten Natuna Tahun 2025.....	35
Tabel. III.10	Perbandingan Kinerja Tahun 2021-2025.....	38
Tabel. III.11	Perbandingan Kinerja Perubahan IKU Tahun 2024-2025.....	39
Tabel. III.12	Capaian Non Indikator Kinerja Utama (Non IKU) Tahun 2025.....	39
Tabel. III.13	Capaian Perubahan Non Indikator Kinerja Utama (Non IKU) Tahun 2025.....	40
Tabel. III.14	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Non IKU.....	42
Tabel. III.15	Perbandingan Realisasi dan Capaian Perubahan Kinerja Non IKU...	43
Tabel. III.16	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026.....	43
Tabel. III. 17	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029.....	45
Tabel. III.18	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) didukung Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	46
Tabel. III.19	Capaian Indikator Kinerja Non Indikator Kinerja Utama (Non IKU) didukung Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	48
Tabel III.20	Realiasi Anggaran terhadap Capaian Realisasi Kinerja Berdasarkan Sasaran Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025.....	52
Tabel III.21	Capaian Kinerja Berdasarkan Realisasi Anggaran Didukung Program dan Kegiatan.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Dinas Sosial Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Kemudian diubah Kembali sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16) dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna yang merupakan unsur pelaksana Bidang Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja (LKj) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja (LKj) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunannya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025 memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 445 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Natuna Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 60 Tahun 2025 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Penilaian Kinerja Organisasi;

Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra,

realisasi pencapaian indikator Dinas Sosial sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Dinas Sosial kepada Bupati Natuna yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja yang merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025 adalah sebagai informasi laporan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kabupaten Natuna Tahun 2025 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2025.

Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan sesuai kewenangannya. Hal-hal yang bersifat strategis terkait pelayanan Dinas Sosial dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang Sosial di Kabupaten Natuna yaitu :

- a. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam penanganan PPKS;
- b. Peningkatan partisipasi dari pilar PSKS pada pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan PPKS
- c. Peningkatan kesadaran, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program sosial;

1.4 Sitematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahunan ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Program dan Kegiatan Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama Pada OPD.
2. Membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini disajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta arah kebijakan dan langkah strategis ke depan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja (PK);
2. Pengukuran Kinerja;
3. Lain-lain yang dianggap perlu.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Natuna

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL, TINGKAT
KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA



BUPATI NATUNA,

[Signature]
WAN. RIWANDI

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil dalam periode 1 (satu) tahun, dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang, serta kendala yang ada dan yang mungkin timbul. Proses perencanaan tersebut menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan, serta ukuran keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Instansi pemerintah lebih dapat menjelaskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Natuna 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Natuna pada tahun 2021-2026, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaraan unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Dalam konteks yang lebih luas, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 merupakan bagian

yang integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

Dalam RPJMD tahun 2021–2026 Kabupaten Natuna Dinas Sosial secara tidak langsung mendukung pecapaian Visi dan Misi Bupati yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Sasaran RPJMD
Kabupaten Natuna dengan Rencana Strategis Dinas
Sosial Kabupaten Natuna 2021-2026

Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
MISI 2 : Kemandirian Ekonomi berbasis potensi local			
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Tinggi dan Berkelanjutan	Angka Kemiskinan (%)	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	Indeks Pengeluaran (%)
Misi 6 : Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY)			
Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat

Sejalan dengan ditetapkananya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2025–2029, telah dilakukan penyesuaian dan perubahan yang bertujuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati, yang selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel II.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Sasaran RPJMD
Kabupaten Natuna dengan Rencana Strategis Dinas
Sosial Kabupaten Natuna 2025-2029

Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
MISI 1 : Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan			
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat berbasis sektor unggulan	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	Indeks Pengeluaran Riil
Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi			
Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Pelayanan Publik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun berjalan, indikator kinerja sasaran, serta rencana pencapaiannya, termasuk program, kegiatan, dan kelompok indikator kinerja beserta target capaian yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran.

Penetapan indikator kinerja dilaksanakan berdasarkan perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta ketersediaan data pendukung. Dalam rangka mengukur tingkat pencapaian tujuan strategis Dinas Sosial, pada masing-masing tujuan strategis telah ditetapkan indikator kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026, yang terdiri dari:

Tabel II.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026

NO.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-					Target Akhir Renstra
						2020/2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	50,41	50,95	51,04	51,13	51,22	51,31	51,31
2.	Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai/ Predikat	78,28 (BB)	78,80	79,00	79,50	79,85	80,05	80,05
3.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,46	3,46	3,47	3,48	3,49	3,50	3,50

Dalam Renstra 2021–2026, tujuan dan sasaran dirumuskan berdasarkan kondisi awal serta prioritas pembangunan yang berlaku pada saat itu, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan capaian kinerja program secara kuantitatif. Namun demikian, dalam pelaksanaannya muncul berbagai tantangan dan dinamika baru, antara lain perubahan karakteristik permasalahan, meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat, serta tuntutan yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja.

Renstra 2025–2029 merumuskan tujuan serta sasaran yang lebih terarah dan terukur dengan penekanan pada peningkatan kualitas layanan, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Penyesuaian tersebut diwujudkan melalui penyempurnaan redaksi tujuan dan sasaran, penggabungan atau pemisahan sasaran tertentu, dan penguatan keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan program kegiatan.

Tujuan strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel II.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-						KET
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Pelayanan Publik yang Akuntabel		Indeks Pengeluaran Riil	Indeks	15.774	15.774	15.988	16.201	16.415	16.628	16.628	
			Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase	77,83	72,21	72,21	72,28	72,32	72,35	72,41	
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,46	4,47	4,48	4,49	4,50	4,51	4,51	
			Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,58	4,58	4,59	4,60	4,61	4,62	4,63	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			Nilai SAKIP	Nilai	78,05	78,05	78,75	79,25	79,75	80,25	80,75	
			Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,05	78,05	78,75	79,25	79,75	80,25	80,75	

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran berjalan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026, khususnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang masih relevan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Sasaran kinerja yang ditetapkan merupakan turunan langsung dari sasaran strategis Renstra yang selanjutnya dijabarkan ke dalam indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan secara terukur, akuntabel, dan berorientasi hasil. Dinas Sosial Kabupaten Natuna telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

Tabel II.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	51,22

Dalam hal terdapat perubahan Perjanjian Kinerja, penyesuaian dilakukan sebagai respon terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah, perubahan regulasi, serta ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk menjaga keselarasan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran kinerja perangkat daerah agar tetap sejalan dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah periode terbaru maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel II.6
Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	72,21

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Sosial telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, maka IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok Dinas Sosial yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025.

2.3 Program Kerja dan Kegiatan

Secara ringkas keseluruhan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun anggaran 2025 yang mendukung Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel II.7
Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator
Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Natuna
Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Persen (%)	63,79
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan	PSKS	6
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan	Sertifikat	1

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen (%)	100
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis diluar panti sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen (%)	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	136
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasa	Persen (%)	70,90
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosia	Persen (%)	70,76
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	KPM	4022

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	67
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada saat dan setelah tanggap Darurat Bencana	Persen (%)	100
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persen (%)	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota korban bencana alam dan sosial	Orang	10
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Siaga Bencana	Kampung	1
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	1
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	Persen	100
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Persen	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	11

Program, kegiatan dan Sub kegiatan beserta Anggaran berkaitan dengan sasaran non IKU yang dilaksanakan Tahun 2025 yaitu :

Tabel II.8
Program dan Kegiatan Non Indikator Kinerja Utama (Non IKU)
Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	85,33
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,64
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	26
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	0
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	64
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	60
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5

Tabel II.9
Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Indikator
Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Natuna
Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	1.338.754
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.338.754
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1.338.754
	Program Rehabilitasi Sosial	341.036.570
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis diluar panti sosial	341.036.570
	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	193.049.480
	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	13.244.090
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	134.743.000
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.255.568.700
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.255.568.700
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.044.988.700
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	210.580.000
	Program Penanganan Bencana	103.267.546
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	101.647.060
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	101.647.060
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapasiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.620.486
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1.620.486

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	746.016
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	746.016
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	746.016
JUMLAH		2.701.957.586

Dari tabel II.9 diatas dapat dilihat bahwa pagu pendukung IKU tahun 2025 sebesar Rp. 2.701.957.586. Pagu pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alokasi anggaran yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian IKU Dinas Sosial. Pagu tersebut difokuskan pada kegiatan yang berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak (impact), dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta keselarasan antara perencanaan dan penganggaran. Pemenuhan pagu pendukung IKU diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tabel II.10
Anggaran Program/Kegiatan Non Indikator Kinerja Utama
(Non IKU) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.466.200
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.466.200
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.466.200
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	4.658.162.330
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.478.365.080

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.478.365.080
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.250.000
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	77.250.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.545.010
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.996.110
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.183.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.400.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	384.848.450
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.965.900
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.200.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	23.063.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.137.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.205.290
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.650.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.130.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	248.425.290
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.748.500
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	172.972.500
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.776.000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
JUMLAH		3.614.096.424

Dari tabel II.10 diatas dapat dilihat bahwa pagu pendukung Non IKU tahun 2025 sebesar Rp. 3.614.096.424. Pagu non Indikator Kinerja Utama (non IKU) merupakan alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi program, kegiatan, dan subkegiatan yang tidak secara langsung mendukung pencapaian IKU, namun memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Pagu non IKU difokuskan pada kegiatan pendukung seperti administrasi umum, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta penunjang operasional perangkat daerah, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel sebagai prasyarat pencapaian kinerja utama.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan kepada para pemangku kepentingan. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rentang waktu satu tahun anggaran untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan penerapan manajemen kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna. Pengukuran tersebut merupakan hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja, yaitu masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome), yang masing-masing menggambarkan aspek penggunaan sumber daya, produk langsung kegiatan, serta dampak atau perubahan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan program/kegiatan.

Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2021–2026. Seiring dengan ditetapkannya Renstra Dinas Sosial Tahun 2025–2029, dilakukan penyesuaian arah kebijakan, tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja untuk menjamin keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah terbaru. Penyesuaian tersebut dilaksanakan secara bertahap dan terukur tanpa mengabaikan komitmen terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra sebelumnya, dan difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur capaian sasaran strategis.

Dalam masa transisi perencanaan tersebut, Dinas Sosial memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tetap berorientasi pada hasil (outcome) serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu sistem yang menekankan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta

pelaporan kinerja secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga setiap program dan kegiatan dapat diukur efektivitasnya dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target indikator kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja strategis dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Hasil pengukuran ini kemudian disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial, yang diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja baik keberhasilan maupun keterbatasan yang diperoleh pada periode atau tahun tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan perencanaan serta pelaksanaan program di masa mendatang.

3.1 Pengukuran Kinerja

Capaian pengukuran kinerja adalah proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati serta strategi Dinas Sosial Kabupaten Natuna. Proses ini dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap target yang telah direncanakan berdasarkan indikator-indikator kinerja yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran objektif tentang efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan strategis organisasi.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

3.2 Analisis Kinerja

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2025.

Tabel III.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan , Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	51.22%	71%	110%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, sekeluarga atau sekelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat mendasar untuk dituntaskan dalam kehidupan dewasa ini, kemiskinan sangat erat kaitannya dengan ketimpangan dan kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Indikator tersebut telah memberikan gambaran awal mengenai upaya Dinas Sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar PPKS, seperti pangan, sandang, papan, dan layanan dasar lainnya. Namun demikian, indikator ini masih memiliki keterbatasan karena lebih menitikberatkan pada aspek pemenuhan input dan output layanan, sehingga belum

sepenuhnya mencerminkan efektivitas dan keberlanjutan penanganan PPKS secara menyeluruh.

Pencapaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025 terealisasi sebesar 71% dari target 51,22%. Dari Indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan target sebesar 51,22% (diperkirakan sebanyak 18.063 jiwa dari PPKS yang berjumlah 35.266 jiwa) yang ditargetkan akan diakomodir atau ditangani pada tahun 2025. Sehingga pada tahun 2025 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilakukan mampu menanganai 25.040 jiwa yang terdiri dari Perlindungan dan Jaminan Sosial sebanyak 24.114 Jiwa, Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebanyak 840 Jiwa dan Penanganan Bencana sebanyak 86 Keluarga dan capaian kinerja tahun 2025 telah melebihi dari target yang ditetapkan.

Dalam implementasinya, pengukuran persentase pemenuhan kebutuhan dasar PPKS belum sepenuhnya mampu menggambarkan kualitas intervensi sosial, kesinambungan layanan, serta keberhasilan proses rehabilitasi dan pemberdayaan sosial. Selain itu, indikator tersebut belum dapat menangkap variasi kompleksitas permasalahan PPKS serta capaian lintas sektor yang diperlukan dalam penanganan kasus secara komprehensif.

Sejalan dengan penyempurnaan sistem perencanaan dan penguatan penerapan SAKIP, dilakukan perubahan IKU menjadi Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Perubahan ini bertujuan untuk menghadirkan indikator yang lebih berorientasi pada hasil (outcome), dengan cakupan penanganan yang lebih komprehensif, meliputi proses pencegahan, penanganan, rehabilitasi sosial, serta rujukan dan tindak lanjut sesuai kebutuhan PPKS.

Berikut capaian perubahan IKU pada Dinas Sosial Tahun 2025 :

Tabel III.2
Capaian Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	72,21%	71,66%	99,24%

Dari tabel III.2 diatas dapat dijelaskana bahwa pengukuran kinerja tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada efektivitas layanan sosial dalam meningkatkan keberfungsian sosial PPKS. Dengan demikian, IKU baru diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap kontribusi Dinas Sosial dalam pencapaian tujuan strategis pembangunan kesejahteraan sosial, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang berkelanjutan

Pencapaian indikator kinerja Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025 terealisasi sebesar 71,66% dari target 72,21%. Dari Indikator Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan target sebesar 72,21% (diperkirakan sebanyak 25.465 jiwa dari PPKS yang berjumlah 35.266 jiwa) yang ditargetkan akan diakomodir atau ditangani pada tahun 2025. Sehingga pada tahun 2025 Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilakukan mampu menanganai 25.272 jiwa yang terdiri dari Perlindungan dan Jaminan Sosial sebanyak 24.315 Jiwa, Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebanyak 871 Jiwa dan Penanganan Bencana sebanyak 86 Keluarga.

Capaian ini didukung adanya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam penanganan kesejahteraan sosial yang bersumber dari bantuan dana Pusat/APBN diantaranya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT/Sembako sebanyak 4.445 KPM atau setara 13.335 jiwa, Program PBI sebanyak 8.448 jiwa, Bantun BLTS sebanyak 3.271 KPM. Program Rehabilitasi Sosial bersumber dari Bantuan Atensi Tahap 1

(Pemberian alat bantu, permakanan dan sandang) yang bersumber dari STPL Bekasi sebanyak 292 Jiwa, Bantuan Atensi (permakanan dan sarkam) Tahap 2 bagi orang tua wali siswa sekolah rakyat sebanyak 90 keluarga, bantuan atensi kewirausahaan tahap 3 sebanyak 31 keluarga, bantuan atensi tahap 4 (Pemberian alat bantu, permakanan dan sandang) sebanyak 292 keluarga. Layanan rujukan anak memerlukan perlindungan khusus yang bersumber dari STPL Bekasi sebanyak 4 orang.

Penanganan kesejahteraan sosial yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Natuna yaitu Bantuan Sosial Lansia sebanyak 292 Jiwa, Bantuan UEP sebanyak 67 KPM, BST Ekstrim Tahap 1 sebanyak 653 Keluarga, BST Ekstrim Tahap 2 sebanyak 195 Keluarga, Pemberian Alat Bantu sebanyak 138 orang, Rehabilitasi ODGJ ke RSJ Tampan Pekanbaru Sebanyak 3 Orang, dan pemulangan orang terlantar sebanyak 1 orang. Selain itu ada juga layanan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan kepada PPKS diantaranya pendampingan anak berhadapan hukum sebanyak 7 orang dan penanganan ODGJ yang meresahkan sebanyak 17 orang.

Perlindungan Sosial bagi korban bencana alam dan sosial yang diberikan yaitu sebanyak 86 keluarga diantaranya bantuan permakanan, logistik dan sandang bagi korban bencana alam dan sosial.

Dari penjelasan capaian kinerja diatas dapat disajikan beberapa data pendukung dalam Laporan Kinerja tahun 2025 yaitu:

1. Data PPKS yang Tertangani Tahun 2025

Penetapan PPKS yang tertangani mengacu pada data PPKS yang bersumber dari DTSEN yang berlaku serta hasil pendataan dan verifikasi lapangan. Data tersebut digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja dan evaluasi efektivitas program dan kegiatan Dinas Sosial dalam penanganan PPKS secara terarah dan terukur yaitu sebagai berikut:

Tabel III.3
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Tertangani Melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2025

NO	KECAMATAN	PKH DAN BPNT	PKH MURNI	BPNT MURNI	PBI	BST EKSTRIM TAHAP 1	BST EKSTRIM TAHAP 2	BANSOS LANSIA	UEP	BLTS	SR
1	Bunguran Barat	245	52	64	584	109	39	46	0	392	
2	Bunguran Batubi	190	62	84	542	60	18	20	0	193	
3	Bunguran Selatan	149	28	36	310	28	8	9	0	104	
4	Bunguran Tengah	147	22	67	140	20	11	6	19	65	
5	Bunguran Timur	542	115	237	2381	69	14	74	48	627	
6	Bunguran Timur Laut	218	39	114	457	105	27	40	0	326	
7	Bunguran Utara	126	31	44	649	22	3	23	0	210	
8	Midai	140	33	58	363	7	3	15	0	197	
9	Pulau Laut	79	18	33	509	37	22	4	0	131	
10	Pulau Panjang	25	4	12	71	14	7	0	0	51	
11	Pulau Seluan	27	8	10	210	3	3	1	0	31	
12	Pulau Tiga	260	63	98	615	73	11	1	0	211	
13	Pulau Tiga Barat	111	25	71	285	1	0	2	0	105	
14	Serasan	222	53	50	498	62	17	22	0	284	
15	Serasan Timur	151	28	67	150	11	3	13	0	150	
16	Suak Midai	52	15	23	151	4	2	12	0	66	
17	Subi	66	10	21	533	28	7	4	0	128	
	TOTAL	2750	606	1089	8448	653	195	292	67	3271	89

Tabel III.4
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Tertangani Melalui Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2025

NO	KECAMATAN	ALAT BANTU	REHAB ODGJ	ORANG TERLANTAR	ABH	ATENSI TAHAP 1	ATENSI TAHAP 2 (WALI SISWA SR)	ATENSI TAHAP 3 (KEWIRAUSAHAAN)	ATENSI TAHAP 4	PENANGANAN ODGJ MERESAHKAN
1	Bunguran Barat	8	1	0	1	38		5	10	1
2	Bunguran Batubi	7	0	0	0	44		0	16	1
3	Bunguran Selatan	5	0	0	0	1		3	7	1
4	Bunguran Tengah	9	0	0	0	24		1	29	1
5	Bunguran Timur	20	0	1	2	55		13	56	10
6	Bunguran Timur Laut	9	1	0	1	68		1	32	1
7	Bunguran Utara	16	0	0	0	21		2	6	0
8	Midai	8	1	0	0	0		1	14	1
9	Pulau Laut	3	0	0	2	0		1	0	0
10	Pulau Panjang	2	0	0	0	0		0	3	0
11	Pulau Seluan	2	0	0	0	0		0	0	0
12	Pulau Tiga	9	0	0	0	0		1	39	0
13	Pulau Tiga Barat	9	0	0	0	40		1	7	0
14	Serasan	10	0	0	0	1		2	14	1
15	Serasan Timur	5	0	0	0	0		0	36	0
16	Suak Midai	7	0	0	1	0		0	1	0
17	Subi	9	0	0	0	0		0	22	0
	TOTAL	138	3	1	7	292	90	31	292	17

Tabel III.5
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Tertangani
Melalui Program Penanganan Bencana Tahun 2025

NO	KECAMATAN	BENCANA ALAM	BENCANA SOSIAL
1	Bunguran Barat		2
2	Bunguran Batubi		
3	Bunguran Selatan	6	
4	Bunguran Tengah		
5	Bunguran Timur	56	5
6	Bunguran Timur Laut	4	1
7	Bunguran Utara	2	
8	Midai		
9	Pulau Laut	9	
10	Pulau Panjang		
11	Pulau Seluan		
12	Pulau Tiga	1	
13	Pulau Tiga Barat		
14	Serasan		
15	Serasan Timur		
16	Suak Midai		
17	Subi		
	TOTAL	78	8

2. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025

Data PPKS digunakan untuk mengidentifikasi jenis, jumlah, dan karakteristik PPKS yang membutuhkan intervensi layanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan tersedianya data PPKS yang akurat dan terintegrasi, diharapkan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesejahteraan sosial daerah. Data PPKS tahun 2025 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.6
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025

NO	Jenis PPKS	Jumlah (Jiwa) 2024	Jumlah (Jiwa) 2025
1.	Anak berhadapan dengan Hukum (ABH)	18	7
2.	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	144	-
3.	Lanjut Usia	4.448	-
4.	Penyandang Disabilitas (PD)	1.250	-
5.	Korban Bencana Alam	43	78
6.	Korban Bencana Sosial	11	8
7.	Fakir Miskin (DTSEN)	26.265	35.173
8.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	4	-
	TOTAL	32.183	35.266

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 yaitu sebanyak 3.083 jiwa hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat dalam penyempurnaan basis data kesejahteraan sosial, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mengalami perubahan menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, akurasi, dan keterpaduan data sosial dan ekonomi masyarakat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesejahteraan sosial yang lebih tepat sasaran.

3. Data Penyandang Disabilitas Tahun 2025

Pemanfaatan data penyandang disabilitas dalam DTSEN bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran pelayanan dan intervensi sosial, termasuk pemenuhan hak dasar, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, serta perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Dengan data yang terintegrasi secara nasional, diharapkan perencanaan program dan kegiatan dapat disusun secara lebih akurat dan berbasis kebutuhan riil. Data disabilitas tahun 2025 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.7
Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2025

KECAMATAN	TUNA NETRA			TUNA DAKSA			TUNA RUNGU			TUNA WICARA			TUNA GRAHITA			CACAT MENTAL			CACAT GANDA			GANGGUAN JIWA			TOTAL
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
BUNGURAN BARAT	2	8	10	26	23	49	9	5	14	3	2	5	8	7	15	6	1	7	3	2	5	6	11	17	122
BUNGURAN BATUBI	0	4	4	21	22	43	11	0	11	0	1	1	2	0	2	0	2	2	6	2	8	6	5	11	82
BUNGURAN SELATAN	4	1	5	19	12	31	3	2	5	0	1	1	3	0	3	0	0	0	5	2	7	9	9	18	70
BUNGURAN TENGAH	2	3	5	28	16	44	6	3	9	3	0	3	1	1	2	0	0	0	3	6	9	10	4	14	86
BUNGURAN TIMUR	10	11	21	41	36	77	16	12	28	4	9	13	14	8	22	1	0	1	13	16	29	19	8	27	218
BUNGURAN TIMUR LAUT	2	3	5	18	14	32	8	5	13	3	1	4	5	4	9	3	0	3	6	7	13	6	5	11	90
BUNGURAN UTARA	3	3	6	30	10	40	4	1	5	0	0	0	3	2	5	0	1	1	3	3	6	10	2	12	75
MIDAI	1	2	3	13	3	16	1	0	1	0	0	0	8	4	12	0	0	0	1	1	2	10	2	12	46
PULAU LAUT	1	4	5	15	10	25	3	1	4	0	1	1	6	2	8	0	1	1	1	2	3	6	2	8	55
PULAU PANJANG	1	1	2	8	9	17	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
PULAU SELUAN	0		0	2	3	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	8
PULAU TIGA	2	2	4	19	9	28	6	2	8	3	0	3	1	1	2	0	0	0	0	4	4	10	0	10	59
PULAU TIGA BARAT	2	2	4	9	14	23	3	1	4	2	0	2	0	4	4	0	0	0	2	0	2	4	2	6	45
SERASAN	1	1	2	39	24	63	3	1	4	3	4	7	4	8	12	0	2	2	4	4	8	4	3	7	105
SERASAN TIMUR	1	1	2	6	6	12	6	6	12	0	0	0	1	0	1	1	0	1	3	0	3	9	1	10	41
SUAK MIDAI	1	1	2	6	6	12	1	0	1	1	0	1	1	1	2	0	0	0	2	1	3	3	0	3	24
SUBI	1	1	2	7	5	12	1	1	2	0	1	1	1	2	3	0	0	0	1	0	1	1	2	3	24
TOTAL 2025	34	48	82	307	222	529	81	41	122	23	20	43	59	44	103	11	7	18	53	51	104	114	56	170	1171
TOTAL 2024	31	59	90	318	230	548	84	41	125	23	21	44	61	45	106	10	8	18	54	52	106	116	56	172	1209
TOTAL 2023	33	66	99	287	211	498	97	47	144	26	21	47	66	55	121	16	12	28	63	73	136	118	70	188	1261

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya penurunan jumlah penyandang disabilitas setiap tahunnya pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 yaitu sebanyak 38 orang hal ini dikarenakan adanya sinkronisasi data, verifikasi dan validasi lapangan, serta koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dan perangkat daerah terkait. Dengan tersedianya data penyandang disabilitas yang lebih mutakhir, terintegrasi, dan akuntabel dalam DTSEN, diharapkan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesejahteraan sosial daerah.

4. Data Lansia Tahun 2025

Pemanfaatan data lansia dalam DTSEN bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran intervensi dan pelayanan sosial, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan lansia agar tetap produktif dan berdaya. Dengan dukungan data yang terintegrasi secara nasional, perencanaan program dan kegiatan dapat disusun secara lebih akurat dan berbasis kebutuhan riil lansia. Data Lansia tahun 2025 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.8
Jumlah Lansia Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	BUNGURAN BARAT	162	234	396
2	BUNGURAN BATUBI	180	157	337
3	BUNGURAN SELATAN	97	113	210
4	BUNGURAN TENGAH	126	159	285
5	BUNGURAN TIMUR	400	536	936
6	BUNGURAN TIMUR LAU	196	209	405
7	BUNGURAN UTARA	133	152	285
8	MIDAI	97	158	255
9	PULAU LAUT	79	81	160
10	PULAU PANJANG	23	26	49
11	PULAU SELUAN	24	38	62
12	PULAU TIGA	122	136	258
13	PULAU TIGA BARAT	59	72	131
14	SERASAN	177	199	376
15	SERASAN TIMUR	122	142	264
16	SUAK MIDAI	41	82	123
17	SUBI	77	99	176
TOTAL TAHUN 2025		2115	2593	4708
TOTAL TAHUN 2024		2065	2383	4448

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan jumlah lansia pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 yaitu sebanyak 260 orang hal ini dikarenakan adanya proses verifikasi dan validasi lapangan serta koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dan perangkat daerah terkait. Dengan tersedianya data lansia yang lebih mutakhir, terintegrasi, dan akuntabel dalam DTSEN, diharapkan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi lansia dapat dilaksanakan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesejahteraan sosial daerah.

5. Data Fakir Miskin berdasarkan DTSEN Tahun 2025

Peralihan dari DTKS ke DTSEN membawa implikasi terhadap mekanisme pendataan, pemutakhiran, serta pemanfaatan data oleh pemerintah daerah, termasuk Dinas Sosial. DTSEN mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi secara nasional, sehingga

diharapkan mampu meminimalkan duplikasi data, meningkatkan validitas sasaran, serta memperkuat sinergi antarprogram dan lintas sektor dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Berikut disajikan data fakir miskin dalam DTSEN desil 1 sampai desil 5 sebagai berikut:

Tabel III.9
Jumlah Fakir Miskin Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kabupaten Natuna Tahun 2025

No	Kecamatan	Desil 1		Desil 2		Desil 3		Desil 4		Desil 5	
		Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu
1	Midai	91	195	110	306	122	347	116	355	118	341
2	Bunguran Barat	244	915	193	591	152	423	162	521	259	762
3	Serasan	163	495	111	337	127	405	162	459	169	532
4	Bunguran Timur	430	1,207	400	1,264	532	1,676	684	2,120	790	2,461
5	Bunguran Utara	125	434	114	362	84	241	123	383	154	437
6	Subi	69	237	59	191	62	206	94	275	100	298
7	Pulau Laut	66	165	88	305	83	253	77	229	93	293
8	Pulau Tiga	82	207	145	503	194	661	216	723	182	593
9	Bunguran Timur Laut	156	444	152	541	167	517	226	633	238	698
10	Bunguran Tengah	106	261	85	230	96	281	98	264	122	386
11	Bunguran Selatan	85	284	86	283	86	282	101	298	117	347
12	Serasan Timur	101	345	102	328	88	273	98	283	124	339
13	Bunguran Batubi	133	417	143	462	143	456	161	513	173	500
14	Pulau Tiga Barat	52	172	58	187	97	337	86	248	82	239
15	Suak Midai	51	133	44	118	61	181	53	141	76	204
16	Pulau Panjang	24	41	24	65	27	94	27	68	28	92
17	Pulau Seluan	28	81	21	75	33	99	42	143	30	82
Total		2,006	6,033	1,935	6,148	2,154	6,732	2,526	7,656	2,855	8,604
Total Keluarga		11,476									
Total Individu		35,173									

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah fakir miskin berdasarkan DTSEN dari desil 1 sampai desil 5 sebanyak 11.476 keluarga dan 35.173 individu. Dalam masa transisi implementasi DTSEN, Dinas Sosial melakukan penyesuaian terhadap sistem pendataan termasuk harmonisasi data penerima manfaat dan penyesuaian indikator kinerja yang berbasis data. Penyesuaian tersebut berpotensi mempengaruhi capaian kinerja secara administratif, namun tidak mengurangi komitmen Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial secara optimal. Dengan diberlakukannya DTSEN, diharapkan perencanaan dan pelaksanaan program kesejahteraan sosial ke depan dapat didukung oleh data yang lebih mutakhir, terintegrasi, dan akuntabel, sehingga mendorong

peningkatan efektivitas penanganan PPKS dan pencapaian tujuan pembangunan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun pelaporan menunjukkan komitmen Dinas Sosial dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan penanganan PPKS dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang terintegrasi, meliputi pendataan, penjangkauan, pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta rujukan dan koordinasi lintas sektor sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan PPKS.

Dalam masa implementasi awal IKU baru, realisasi kinerja difokuskan pada penyelarasan indikator, mekanisme pengukuran, serta penyesuaian program dan kegiatan agar selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra terbaru. Meskipun masih dalam tahap penyesuaian, capaian realisasi IKU telah menunjukkan arah yang positif dan menjadi dasar penguatan pelaksanaan penanganan PPKS secara lebih komprehensif dan berorientasi pada hasil.

Realisasi IKU Penanganan PPKS tidak hanya diukur dari jumlah PPKS yang memperoleh layanan, tetapi juga dari keterpaduan proses penanganan dan tindak lanjut layanan yang diberikan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keberfungsian sosial PPKS secara bertahap dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat, tentunya tidak terlepas dari adanya Kerjasama dan koordinasi yang baik dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diantaranya dengan pihak Bank Penyalur Bantuan, PT. Pos, OPD terkait, Pihak Kecamatan, Pihak Kelurahan/Desa hingga sampai ke RT/RW, Tenaga Pendamping baik pendamping PKH, Pendamping BPNT/Sembako, Karang Taruna, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Tagana dan pilar-pilar sosial lainnya.

Dalam pelaksanaannya, capaian PPKS yang tertangani dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas data, dukungan anggaran, sumber daya manusia, serta koordinasi lintas sektor. Selain itu, adanya penyesuaian

sistem data, termasuk peralihan dari DTKS ke DTSEN, turut berdampak pada dinamika jumlah PPKS yang tercatat sebagai tertangani secara administratif. Dengan meningkatnya jumlah dan kualitas penanganan PPKS, diharapkan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan keberfungsian sosial PPKS serta mendukung pencapaian tujuan strategis pembangunan kesejahteraan sosial daerah.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) oleh inspektorat agar menyajikan seluruh target dan realisasi, target kinerja (tujuan, sasaran dan program) tahun berjalan serta perbandingannya dengan Renstra dalam laporan kinerja, maka Dinas Sosial telah melakukan penyempurnaan penyajian informasi target dan realisasi dengan membandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan menyajikan seluruh target dan realisasi kinerja secara lengkap dan sistematis, mencakup target kinerja pada tingkat tujuan, sasaran strategis, dan program pada tahun berjalan.

Dinas Sosial telah melaksanakan reviu terhadap Laporan Kinerja secara internal sebelum dilakukan pengesahan oleh Kepala Dinas Sosial. Reviu tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, serta menjamin keakuratan dan kelengkapan penyajian data kinerja.

Proses reviu dilakukan oleh unit kerja terkait dengan memperhatikan keterpaduan indikator kinerja, kesesuaian target dan realisasi, serta konsistensi dengan dokumen perencanaan yang berlaku, termasuk Renstra dan perjanjian kinerja. Selain itu, reviu juga mencakup aspek keandalan data, ketepatan analisis capaian kinerja, dan kelengkapan narasi evaluatif.

Hasil reviu internal digunakan sebagai dasar penyempurnaan Laporan Kinerja sebelum ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Sosial. Dengan dilaksanakannya reviu tersebut, diharapkan kualitas Laporan Kinerja semakin meningkat, akuntabel, dan mampu menjadi

instrumen evaluasi kinerja yang andal dalam mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Dalam Laporan Kinerja, Dinas Sosial telah menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), guna menunjukkan tingkat konsistensi dan keselarasan antara perencanaan strategis dan capaian kinerja tahunan. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai progres pencapaian sasaran strategis menuju target akhir Renstra. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.10
Perbandingan Kinerja Tahun 2021-2025

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2021			2022			2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Penguatan Pelaksanaan Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	50.41	50.41	100	50.95	77.21	152	51.04	75.44	148	51.13	77.70	152	51.22	71.01	139

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian kinerja IKU telah melebihi dari target hal ini dikarenakan upaya Pemerintah Pusat maupun Daerah telah konsen dalam program kesejahteraan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar PPKS. Pada Tahun 2025 IKU baru Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih berada pada tahap awal implementasi seiring dengan penyesuaian Renstra dan sistem pengukuran kinerja dan masih berlangsungnya proses penyelarasan indikator, mekanisme pengukuran, serta pemanfaatan basis data terbaru. Dapat dilihat pada tabel tabel berikut:

Tabel III.11
Perbandingan Kinerja Perubahan IKU Tahun 2024-2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	77,83	72,21%	71,66%	99,25%

Dari tabel diatas dapat dilihat realiasi tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 hal ini dikarenakan Jumlah PPKS bersifat dinamis sehingga target penanganan tidak sepenuhnya sebanding dengan penambahan jumlah PPKS dan terjadinya transisi penggunaan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berdampak pada perubahan jumlah dan komposisi PPKS yang tertangani.

Tabel. III.12
Capaian Non Indikator Kinerja Utama (Non IKU) Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	79,85	75,05	93,99
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,49	3,70	106

Nilai Evaluasi Sakip terealisasi sebesar 75,05 dengan target 79,85 sehingga capaian kinerja sebesar 93,99% dengan skala nilai BB atau sangat baik. Walaupun sudah masuk kategori sangat baik namun masih ada beberapa aspek yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Dinas Sosial telah melaksanakan prinsip akuntabilitas akan tetapi masih perlu perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja. Nilai Evaluasi Sakip tahun 2025 menggunakan Nilai Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun 2024. Nilai Evaluasi Sakip merupakan hasil dari proses

evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana instansi telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Nilai indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 teralisasi sebesar 3,70 dari target 3,49 dengan capaian 106%. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi publik. IKM mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan berdasarkan sejumlah indikator yang telah ditentukan.

Seiring dengan ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2025–2029, dilakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja non-Indikator Kinerja Utama (non-IKU) agar selaras dengan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis yang baru. Perubahan indikator non-IKU tersebut dimaksudkan untuk mendukung pencapaian kinerja utama secara lebih efektif melalui penguatan fungsi penunjang, tata kelola, dan kualitas pelayanan organisasi. Berikut capaian indikator kinerja Non IKU:

Tabel. III.13
Capaian Perubahan Non Indikator Kinerja Utama (Non IKU) Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	4,58	4,58	100
2	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,05	75,05	96,16

Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepuasan

masyarakat. IPP menjadi salah satu instrumen penting dalam menilai kinerja pelayanan dan tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan. Nilai IPP Dinas Sosial tahun 2025 terealisasi sebesar 4,58 dari target 4,58 dengan capaian 100%, hal ini menunjukkan capaian kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan, sekaligus mencerminkan komitmen Dinas Sosial dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Capaian tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pemenuhan standar pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana, kompetensi aparatur, serta penerapan sistem pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan Masyarakat.

Nilai SAKIP Perangkat Daerah terealisasi sebesar 75,05 dengan target 78,05 sehingga capaian kinerja sebesar 96,05% dengan skala nilai BB atau sangat baik. Walaupun sudah masuk kategori sangat baik namun masih ada beberapa aspek yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Dinas Sosial telah melaksanakan prinsip akuntabilitas akan tetapi masih perlu perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja. Nilai Evaluasi Sakip tahun 2025 menggunakan Nilai Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun 2024. Nilai Evaluasi Sakip merupakan hasil dari proses evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana instansi telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Nilai Hasil evaluasi SAKIP menjadi dasar bagi Dinas Sosial untuk mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan, seperti penguatan orientasi hasil (outcome), pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan kualitas evaluasi internal. Dengan demikian, capaian Nilai SAKIP tidak hanya menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan

Perubahan non-IKU tersebut tidak mengurangi fokus Dinas Sosial terhadap pencapaian tujuan strategis, melainkan menjadi fondasi

pendukung yang memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan utama. Dengan demikian, indikator non-IKU dalam Renstra 2025–2029 diharapkan mampu mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Tabel. III.14
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Non IKU

Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	76	78.28	103	78.80	80.61	102	79	73.15	93	79.50	78.05	98.18	79.85	75.05	93.99
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.46	3.46	100	3.46	3.48	101	3.47	3.47	100	3.48	3.63	104	3.49	3.7	106

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator Nilai Evaluasi Sakip mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan peningkatan kinerja yang baik dan akuntabel. Sedangkan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat telah mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini telah menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah memberikan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat pengguna layanan.

Pada tahun pelaporan, realisasi kinerja non IKU baru pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Namun demikian, capaian kinerja menunjukkan variasi antar indikator yang dipengaruhi oleh tingkat kompleksitas kegiatan, ketersediaan sumber daya, serta adanya penyesuaian terhadap kebijakan dan arah perencanaan sesuai Renstra terbaru. Realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja Non IKU baru telah disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.15
Perbandingan Realisasi dan Capaian Perubahan Kinerja Non IKU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	4,58	4,58	4,58	100
2	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,05	78,05	75,05	96,16

Tabel. III.16
Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					Kondisi Akhir Renstra	Capaian Akhir Renstra
		2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	50,41%	77,21%	75,44%	77,70%	71,01	51,31%	110%
2.	Nilai Evaluasi Sakip	78,28	80,61	73,15	78,05	75,05	80,05	93,75
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,46	3,48	3,47	3,63	3,70	3.50	105

Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra pada Indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah tercapai dan telah melebihi target yaitu sebesar 110%. Indikator Nilai Evaluasi Sakip telah mengalami penurunan yaitu sebesar 93,75% dan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat menjadi 105%. Capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif apabila dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra). Secara umum, indikator sasaran strategis mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada awal periode Renstra, meskipun belum seluruhnya mencapai target akhir Renstra yang telah ditetapkan.

Tercapainya Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat meningkatkan penanganan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sehingga keterkaitan dengan Indikator Sasaran RPJMD pada Indeks Pengeluaran yaitu dengan adanya bantuan sosial yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat miskin dapat mempertahankan daya beli atau pengeluaran masyarakat, tentunya dalam hal ini tidak hanya mengandalkan bantuan sosial dari Pemerintah saja, akan tetapi harus ada aksi lebih lanjut untuk membuat mereka bangkit dan mandiri diantaranya dalam bentuk pelatihan beserta sarana penunjang untuk mereka implementasikan apa yang telah mereka pelajari, pemberdayaan masyarakat miskin, pemberian bantuan modal usaha seperti Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk menstabilkan ketahanan ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, dalam hal ini tentunya tidak terlepas dari peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di masing-masing Kecamatan karena PSKS merupakan mitra Dinas Sosial dalam menangani PPKS terutama untuk melakukan pendampingan, monev dan memberikan edukasi kepada PPKS. Penanganan PPKS ini sebenarnya tidak hanya tugas Dinas Sosial sendiri akan tetapi perlu adanya sinergi dan kerja sama dari berbagai dinas terkait yang mempunyai Program dan Kegiatan yang sasarannya adalah PPKS.

Realisasi kinerja terhadap target akhir Rencana Strategis (Renstra) menunjukkan tingkat kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial hingga tahun pelaporan. Realisasi kinerja tersebut merupakan akumulasi capaian tahunan yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, baik indikator kinerja utama maupun indikator pendukung lainnya.

Tabel. III.17
Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Akhir Renstra
Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Kondisi Akhir Renstra	Capaian Akhir Renstra
1.	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	71,66	72,41	98,96%
2.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	4,58	4,63	98,92%
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,05	80,75	92,94%

Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra pada Indikator Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah tercapai sebesar 71,66% dengan capaian terhadap akhir Renstra sebesar 98,96%. Indikator Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah tercapai sebesar 4,58 dengan capaian terhadap akhir Renstra sebesar 98,92% dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah terealisasi sebesar 75,05 dengan capaian terhadap akhir Renstra sebesar 92,94%.

Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) memiliki keterkaitan erat dengan Indeks Pengeluaran Riil sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Penanganan PPKS yang efektif dan tepat sasaran berkontribusi pada peningkatan kemampuan individu atau keluarga PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan daya beli, yang selanjutnya tercermin dalam perbaikan indeks pengeluaran riil. Melalui berbagai bentuk intervensi sosial, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi, penanganan PPKS diarahkan tidak hanya untuk mengurangi kerentanan sosial, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas ekonomi PPKS secara bertahap. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan pengeluaran riil rumah tangga PPKS, khususnya untuk kebutuhan dasar, sehingga mendorong perbaikan tingkat kesejahteraan.

Evaluasi terhadap realisasi kinerja terhadap target akhir Renstra menjadi dasar bagi Dinas Sosial dalam melakukan penyesuaian kebijakan, penguatan program prioritas, serta optimalisasi sumber daya, sehingga

pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada akhir periode Renstra dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

Tabel III.18
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) didukung Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	63,79%	60,34%	94,59%
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan	6 PSKS	6 PSKS	100%
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100%
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar pant	100%	100%	100%
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis diluar panti sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	136 Orang	138 Orang	101,47%
	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	1 Orang	50%
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	3 Orang	3 Orang	100%

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Rujukan	Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	70,90%	68,56%	96,70%
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	70,76%	68,88%	97,34%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4.022 KK	4.737 KK	110%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	67 Orang	67 Orang	100%
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan setelah tanggap Darurat Bencana	100%	100%	100%
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kotakorban bencana alam dan sosial	10 Orang	68 Orang	100%
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100 Persen	100 Persen	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100 Persen	100 Persen	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	11 Makam	11 Makam	100%

Tabel III.19
Capaian Indikator Kinerja Non Indikator Kinerja Utama (Non IKU)
didukung Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	85,33	85	99,61%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%
Meningkatnya Pelayanan Publik perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,64	3,70	101,65%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	26 Orang	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	0 Persen	0 Persen	0%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	0%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75%	100%	110%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	15 Laporan	23 Laporan	110%

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Konsultasi SKPD	Konsultasi SKPD			
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	64 Persen	63,38 Persen	99,03%
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	0 Paket	0%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	75 Persen	100 Persen	110%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75 Persen	75 Persen	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	11 Unit	110%

Analisa pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran pencapaian tingkat sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tabel III.18 dan Tabel III.19 diatas menggambarkan tingkat pencapaian dari target yang di tetapkan Dinas Sosial pada tahun 2025 telah teralisasi dengan baik dan ada yang melebihi target dan ada yang tidak

teralisasi yang disebabkan ketidakpastian tersedianya anggaran untuk menghindari timbulnya hutang kepada pihak penyedia.

a. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis

Pada Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Natuna menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (Penja) Tahun 2025 dengan target 51,22% dan teralisasi sebesar 71,01%, capaian kinerja mampu direalisasikan dengan baik yaitu melebihi 100% atau interpretasi sangat memuaskan. Pada Tahun 2025 telah menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja dengan Indikator Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan target 72,21 dan telah terealisasi sebesar 71,66% dengan capaian kinerja 99,24%.

Analisa keberhasilan dan kegagalan kinerja sasaran strategis dilakukan untuk menilai tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Analisis ini disusun berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja, serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi capaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis didukung oleh beberapa faktor, antara lain keselarasan perencanaan dan penganggaran, fokus pada program prioritas, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan data sebagai dasar penetapan sasaran dan penanganan PPKS. Selain itu, komitmen sumber daya manusia dan dukungan kebijakan turut berperan dalam mendorong capaian kinerja yang optimal.

Di sisi lain, kegagalan atau belum tercapainya sebagian sasaran strategis dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, dinamika kebijakan, perubahan indikator kinerja, serta tantangan dalam pemutakhiran dan validitas data. Peralihan sistem data dan penyesuaian Renstra juga berdampak pada proses pengukuran dan capaian kinerja secara administratif.

Hasil analisa ini menjadi dasar bagi Dinas Sosial dalam merumuskan langkah perbaikan dan strategi tindak lanjut, termasuk

penguatan perencanaan berbasis hasil, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan koordinasi dan inovasi layanan. Dengan demikian, analisa keberhasilan dan kegagalan kinerja sasaran strategis diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja yang lebih efektif dan berkelanjutan pada periode selanjutnya.

b. Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis

Walaupun capaian kinerja yang diperoleh Tahun 2025 sangat memuaskan, ada beberapa kendala dan hambatan dilapangan dalam pencapaian Sasaran Strategis Dinas Sosial diantaranya yaitu :

- Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana pendukung;
- Dinamika kebijakan dan perubahan sistem pendataan, termasuk peralihan dari DTKS ke DTSEN, memerlukan penyesuaian dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengukuran kinerja;
- Kondisi sosial ekonomi masyarakat, keterbatasan koordinasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal;

c. Strategi Pemecahan Masalah

Sehubungan dengan kendala dan hambatan dalam pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025, Dinas Sosial Kabupaten Natuna mengambil Langkah (strategi) pemecahan sebagai berikut:

- Penguatan perencanaan berbasis hasil melalui penyelarasan indikator kinerja dengan tujuan dan sasaran strategis;
- Optimalisasi penganggaran yang berorientasi pada pencapaian kinerja utama;
- Peningkatan kualitas data melalui pemutakhiran dan validasi data PPKS berbasis DTSEN sebagai dasar penetapan sasaran program yang lebih tepat sasaran;
- Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, peningkatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan sosial;

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.20
Realiasi Anggaran terhadap Capaian Realisasi Kinerja
Berdasarkan Sasaran Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Anggaran			Capaian Indikator Sasaran
			Anggaran	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2.701.957.586	1.917.499.914	70,97	99,24%
2	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3.612.299.970	3.374.870.564	93,43	100
3	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1.796.454	1.620.972	90,23	96,16

Berdasarkan tabel diatas alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis IKU dengan indikator Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025 adalah sebesar sebesar Rp. 2.702.957.586,- teralisasi sebesar Rp. 1.917.499.914,- atau 70,97%, realisasi akuntabilitas kinerja sebesar **71,66%** yang terdiri dari 4 (empat) program pendukung yaitu:

- a. Program Pemberdayaan Sosial dengan alokasi anggaran yaitu sebesar Rp. 1.338.754,-
- b. Program Rehabilitasi Sosial dengan alokasi anggaran yaitu sebesar Rp. 341.036.570,-
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.255.568.700,-
- d. Program Penanganan Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 103.267.546,-
- e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 746.016,-

Alokasi anggaran pada sasaran strategis Non IKU Tahun 2025 dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah adalah sebesar Rp. 3.612.299.970 dan terealisasi sebesar Rp. 3.374.870.564 atau 94,43% dengan realisasi nilai indeks sebesar 4,58. Sedangkan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.796.454 telah terealisasi sebesar Rp. 1.620.972 atau 90,23% dengan realisasi nilai akuntabilitas kinerja sebesar 75,05.

Tabel III.21
Capaian Kinerja Berdasarkan Realisasi Anggaran Didukung Program dan Kegiatan

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2025		%	Capaian Indikator Kinerja
		Anggaran	Realisasi		
Sasaran : Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Indikator : Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Pemberdayaan Sosial	1.338.754	1.338.754	100	99,24%
	Program Rehabilitasi Sosial	341.036.570	255.160.483	74,82	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.255.568.700	1.600.933.470	70,98	
	Program Penanganan Bencana	103.267.546	59.321.191	57,44	
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	746.016	746.016	100	
Sasaran : Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah Indikator : Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.612.299.970	3.374.870.564	93,43	100
Sasaran : Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.796.454	1.620.972	90,23	96,16

Akuntabilitas Kinerja dibandingkan dengan akuntabilitas penyerapan anggaran Dinas Sosial Tahun 2025 yang mana total anggaran

belanja seluruhnya sebesar Rp. 8.096.797.000,- (Delapan Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) namun pada saat perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Dinas Sosial mengalami perubahan atau pergeseran menjadi Rp. 6.316.054.010,- (Enam Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Puluh Empat Ribu Sepuluh Rupiah).

Secara umum Akuntabilitas Keuangan Dinas Sosial menunjukkan nilai yang memuaskan, dari Total Belanja Pegawai Rp. 3.121.195.564,- terealisasi sebesar Rp. 2.992.340.680,- (95,87%). Untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.338.858.446,- terealisasi sebesar Rp. 929.423.770,- (69,42%), untuk Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 1.819.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.359.240.000,- (74,70%), sedangkan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 36.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.987.000,- (35,58%).

Total anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025 sebesar Rp. 2.701.957.586,- (42,78%), sementara anggaran non IKU sebesar Rp. 3.614.096.424,- (57,22%) merupakan belanja yang tidak secara langsung mendukung pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial seperti belanja untuk kebutuhan rutinitas kantor.

Dengan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar Rp. 2.701.957.586,- terealisasi sebesar Rp. 1.917.499.914,- atau (70,97%) dengan realisasi akuntabilitas kinerja sebesar **71,66%** diharapkan Dinas Sosial mampu mencapai target RPJMD tahun 2025-2029 dan mampu melaksanakan anggaran dengan cukup efektif dan efisien.

Efisiensi anggaran Dinas Sosial tahun 2024 sebesar Rp. 2.701.957.586,- atau (42,78%) ini diperoleh dari perbandingan antara anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan total belanja inefisiensi anggaran Dinas Sosial sebesar Rp. 3.614.096.424,- atau (57,22%).

Analisis efisiensi dan inefisiensi anggaran dilakukan untuk menilai sejauh mana pemanfaatan sumber daya keuangan telah mendukung

pencapaian kinerja Dinas Sosial secara optimal. Analisis ini membandingkan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang dihasilkan, baik pada indikator kinerja utama maupun indikator pendukung lainnya.

Efisiensi anggaran tercermin dari capaian kinerja yang dapat diraih dengan realisasi anggaran yang lebih rendah atau sesuai dengan pagu yang ditetapkan, tanpa mengurangi kualitas output dan outcome yang dihasilkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program telah dilakukan secara tepat sasaran, serta didukung oleh pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel.

Sementara itu, inefisiensi anggaran terjadi pada kegiatan yang realisasi anggarannya relatif tinggi pada porsi belanja khususnya gaji dan tunjangan pegawai karena bersifat wajib dan mengikat sehingga tidak dapat disesuaikan secara proporsional terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal untuk penghematan pada pos belanja tersebut menjadi terbatas, sehingga secara akumulatif nilai inefisiensi yang tercatat menjadi lebih besar meskipun telah dilakukan pengendalian pada belanja operasional dan belanja kegiatan lainnya.

Hasil analisis efisiensi dan inefisiensi anggaran menjadi dasar bagi Dinas Sosial dalam melakukan perbaikan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, termasuk penajaman program prioritas, optimalisasi alokasi anggaran, serta peningkatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran pada periode selanjutnya. Dengan demikian, pengelolaan anggaran diharapkan semakin efisien dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencapaian Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta dalam rangka perwujudan “*Good Governance*”. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran Visi, Misi, Strategi Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Secara umum Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada Tahun 2025 telah dilaporkan sesuai dengan realisasi kinerja. Oleh karena itu pembinaan dan pembenahan sarana prasarana dan sumberdaya manusianya harus lebih ditingkatkan serta adanya Anggaran untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai target dari indikator yang ingin dicapai. Sehingga arah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan bisa terarah dan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dari rencana tersebut dapat diidentifikasi bahwa upaya Dinas Sosial Kabupaten Natuna untuk mewujudkan Visi dan Misi dilaksanakan melalui 6 (enam) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan.

Berdasarkan pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Natuna didanai dengan anggaran APBD Kabupaten Natuna Tahun 2025 dengan klasifikasi pendanaan sebesar Rp. 6.316.054.010,- (*Enam Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Puluh Empat Ribu Sepuluh Rupiah*). Capaian kinerja tersebut diwujudkan melalui realisasi anggaran sebesar 83,82% atau sebesar Rp. 5.293.991.450,- (*Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja dan mempercepat pencapaian target akhir Renstra, Dinas Sosial pada Tahun 2026 perlu melakukan langkah-langkah perbaikan diantaranya Penguatan pemutakhiran dan integrasi data sosial, Optimalisasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, Peningkatan kompetensi SDM kesejahteraan sosial, Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja dan Peningkatan jangkauan pelayanan.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan, sehingga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Dinas Sosial di masa yang akan datang.

Ranai, 19 Januari 2026
Kepala Dinas

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **PURYANTI, SP, M.A.P**
Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **BUPATI NATUNA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,

PURYANTI, SP, M.A.P
NIP. 19750706 200003 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	51,22

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	4.378.055.430,00
2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp.	424.202.570,00
3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp.	3.159.794.000,00
4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp.	134.745.000,00
Jumlah	Rp.	8.096.797.000,00

Ranai, 13 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial

Bupati Natuna,


WAN SIEWANDI, S.Sos, M.Si


PURYANTI, SP. M.A.P
NIP. 19750706 200003 2 008



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PURYANTI, SP., M.A.P**
Jabatan : **Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **CEN SUI LAN**
Jabatan : **Bupati Natuna**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. Rp. 5.908.275.894,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) menjadi Rp. 6.316.054.010,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Puluh Empat Ribu Sepuluh Rupiah) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 24 Oktober 2025

Pihak Kedua,

CEN SUI LAN

Pihak Pertama,

PURYANTI, SP., M.A.P
NIP. 19750706 200003 2 008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	72.21

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	3,614,096,424
- Program Pemberdayaan Sosial	Rp.	1,338,754
- Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	341,038,570
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	2,255,568,700
- Program Penanganan Bencana	Rp.	103,267,546
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	746,016
JUMLAH	Rp.	6,316,054,010

Ranai, 24 Oktober 2025



LAMPIRAN II

PENGUKURAN KINERJA

ESELON II

TAHUN 2025

PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Sosial
Tahun Anggaran : 2025 Semester II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	72.21	71.66	99.24
Capaian Kinerja						99.24

	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,614,096,424	3,376,491,536	93.43
Program Pemberdayaan Sosial	1,338,754	1,338,754	100
Program Rehabilitasi Sosial	341,036,570	255,160,483	74.82
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2,255,568,700	1,600,933,470	70.98
Program Penanganan Bencana	103,267,546	59,321,191	57.44
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	746,016	746,016	100
Jumlah	6,316,054,010	5,293,991,450	83.82

Ranai, 31 Desember 2025

Kepala Dinas

PURWATI, SP., M.A.P
Pemuda Utama Muda
NIP. 19750706 200003 2 008

LAMPIRAN III

PENGUKURAN IKU TAHUN 2021-2025

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2025

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2021			2022			2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Penguatan Pelaksanaan Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	50.41	50.41	100	50.95	77.21	152	51.04	75.44	148	51.13	77.70	152	51.22	71.01	139

PENGUKURAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024-2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	77,83	72,21 %	71,66%	99,25%

PENGUKURAN NON INDIKATOR KINERJA UTAMA (NON IKU) TAHUN 2021-2025

Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	76	78.28	103	78.80	80.61	102	79	73.15	93	79.50	78.05	98.18	79.85	75.05	93.99
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.46	3.46	100	3.46	3.48	101	3.47	3.47	100	3.48	3.63	104	3.49	3.7	106

**PERUBAHAN PENGUKURAN NON INDIKATOR KINERJA UTAMA (NON IKU)
TAHUN 2024-2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi i 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	4,58	4,58	4,58	100
2	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,05	78,05	75,05	96,16